

# prosiding

# Seminar NASIONAL

## PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN



### 2014

**"Pembangunan Berkelanjutan dalam  
Peningkatan Ketahanan Energi, Pengelolaan  
Lingkungan dan Pengelolaan Bencana"**



**Semarang, 16 Oktober 2014**



Program Studi Ilmu  
Lingkungan  
Universitas Diponegoro



Program Studi Pascasarjana  
Pengelolaan Sumberdaya Alam  
dan Lingkungan  
Fakultas Pertanian  
Universitas Bengkulu



Pusat Studi Manajemen  
Bencana  
UPN "Veteran"  
Yogyakarta

## **PROSIDING**

### **Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 2014**

**“Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perspektif Ketahanan Energi, Pengelolaan Lingkungan dan Pengelolaan Bencana”**

#### **Editor :**

Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D

Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA

Dr. Henna Rya Sunoko, MES

Dr. Hartuti Purnaweni, MPA

#### **Penyunting :**

Aan Sujatmiko, Yusa Eko Saputro, Melia Ariyanti, Tri Mulyaningsih dan Tim Editing MIL 38

#### **Layout Design :**

Eko Setyawan

Wahyu Yuwono

Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (UNDIP)

Program Studi Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan  
Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu

Program Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta

#### **Diterbitkan oleh :**

Program Studi Ilmu Lingkungan

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Jl. Imam Bardjo, SH No. 5 Semarang 50241 Telp/Fax. (024) 8453635, 8452770

e-mail : mil\_undip@yahoo.com

ISBN 978-602-17001-2-9



## Implementasi Pendidikan Transformatif dalam Pengelolaan Mitigasi Bencana Pudjo Suharso<sup>1\*</sup>, Sukidin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dosen P.IPS FKIP Universitas Jember  
\*e-mail : harsodit@yahoo.co.id

### ABSTRACT

*Indonesia is a country rich in natural disasters. Drought, floods, landslides, cyclones, earthquakes, volcanic eruptions, tsunamis, forest fires, a "wealth" of natural disasters experienced whenever this beautiful country. So many and variety of natural disasters in Indonesia, some scientists say that Indonesia is a "laboratory" disaster, while the people prefer to call "supermarket" disaster. The reality of natural disasters in this country is a necessity. In the old paradigm of disaster management, the measures taken more focus on post-disaster rehabilitation and reconstruction. But in the new paradigm, disaster management is more focused on preventive measures. Here the disaster mitigation management becomes very important. This study aims to determine the management practices in various areas of disaster mitigation disaster involving community participation in implementing transformative education undertaken by various parties, both the people themselves and the government. In addition, to identify and describe the differences in public response to the implementation of transformative education in disaster mitigation and management of disaster itself. The method emphasizes constructivist used with reference to a qualitative approach. The results were not all the people in the disaster area have the same response to transformative education in the management of disaster mitigation. Communities can address natural disasters as a "destiny" that must be accepted willingly. Implementation of disaster management transformative education is less effective because it is not based on a systematic learning structure. The recommendation given is the need to learn the systematic management of disaster mitigation as an early preventive efforts through transformative education curriculum adequate disaster.*

**Keywords :** *disaster curriculum, disaster mitigation, transformative education*

### I. PENDAHULUAN

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dalam paradigma lama penanganan bencana alam, kebijakan yang diambil lebih focus pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Banyak negara yang terperangkap pada paradigma lama untuk menangani bencana alam.

*Historically, public policy in this area has been heavily concentrated on response, reflecting a belief that disasters are "acts of God" or "acts of Nature". They trapped in "old paradigm". If the government want to manage the disaster, they have to leave old paradigm and switch to to the new paradigm in manage the disaster. A "paradigm shift" is required to move from reactive response-based disaster management to a more proactive effort aimed at disaster mitigation and risk reduction. As a reflection of this, many countries have revised their disaster management policies to integrate a greater emphasis on mitigation (Henstra, 2010:305).* Penanganan bencana yang dilakukan pasca kejadian umumnya dilakukan karena banyak negara mengalami kebingungan mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan atau yang sering diungkapkan oleh Howes bahwa banyak negara mengalami "public policy wicked problems".

Oleh karena itu kebijakan penanganan bencana tidak dapat lagi mendasarkan pada paradigma lama. Dalam paradigma baru, penanganan bencana lebih difokuskan pada upaya preventif. Di sini pengelolaan mitigasi bencana menjadi sangat penting. Pengelolaan mitigasi bencana dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi risiko bencana (*risk reduction*)(BNPB, 2010).

Dalam pengelolaan mitigasi bencana, pengurangan risiko bencana di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan partisipasi dari semua pihak terkait. Upaya ini dilakukan dengan komitmen yang kuat dan mengedepankan tindakan-tindakan yang harus diprioritaskan.

Penyusunan prioritas ini perlu dilakukan untuk membangun dasar yang kuat dalam melaksanakan pengelolaan mitigasi bencana yang berkelanjutan serta mengakomodasikan kesepakatan internasional dan regional dalam rangka mewujudkan upaya bersama yang terpadu. Dalam pengelolaan mitigasi bencana, terdapat lima prioritas pengurangan risiko bencana yang harus dilakukan. *Pertama*, meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat, *kedua*, mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini, *ketiga*, memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat, *keempat*, mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana,

dan kelima, memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif. (Pant and Pande, 2012).

Dengan berdasarkan kepada prioritas pelaksanaan pengurangan risiko bencana tersebut maka upaya dan rencana aksi yang perlu dilakukan setidaknya mencakup peletakan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat, dan memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat, dengan kegiatan, salah satunya adalah mengembangkan program-program pendidikan formal melalui introduksi kurikulum kebencanaan dan pendidikan non formal bagi masyarakat berupa pelatihan dan pembelajaran pengurangan risiko bencana pada kehidupan sehari-hari.

Implementasi pendidikan dalam pengelolaan mitigasi bencana yang ditujukan untuk mengurangi risiko bencana yang dilaksanakan di sekolah sebagian telah dilakukan dengan memasukkan materi kebencanaan dalam kurikulum sekolah. Namun dalam praktik belum berjalan dengan baik. Masalah kebencanaan masih belum dipandang penting dalam pendidikan di sekolah. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa bencana merupakan "lakdir", yang tak memerlukan persiapan karena tidak ada satu manusia pun yang dapat mengetahui kapan bencana itu terjadi (Arimastuti, 2011).

Sebaliknya dalam pendidikan non formal berupa pelatihan dan pembelajaran pengelolaan mitigasi bencana kepada masyarakat terutama yang berada di wilayah-wilayah rawan bencana, implementasi model pendidikan transformative memberikan hasil yang signifikan bagi pengurangan risiko bencana, khususnya pada aras kesadaran dan sikap perilaku yang berkembang di masyarakat. (Victoria, 2012).

Dimaksud dengan pendidikan transformative adalah "*education driven by ideas that have the potential to radically change our understanding of an important existing scientific concept or leading to the creation of a new paradigm of science. Such education also is characterized by its challenge to current understanding or its pathway to new frontiers*" (Dietz and Rogers, 2014). Pada intinya, model pendidikan transformative adalah pembelajaran yang meletakkan subyek pembelajaran untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan kemampuan dalam menganalisis kebutuhan pengembangan diri. Dalam kaitannya dengan pengelolaan mitigasi bencana, implementasi model pendidikan transformative diletakkan pada kemampuan dan ide-ide masyarakat setempat untuk mengurangi risiko bencana yang didasarkan pada kapasitas masyarakat dan kerajinan local sebagai *indigenous knowledge*.

Implementasi model pendidikan transformative dalam pengelolaan mitigasi bencana sebagai upaya mengurangi risiko bencana (*disaster risk reduction*) dalam penelitian ini difokuskan pada 5 ranah pelatihan dan pengembangan program pengelolaan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana. Kelima ranah tersebut adalah : Pertama, pendidikan dan pelatihan untuk pengambilan keputusan ancaman bencana; Kedua, pelatihan kajian risiko bencana; Ketiga, pelatihan pemahaman gejala bencana alam; Keempat, *workshop* budaya sadar bencana dan Kelima, pemantauan ketahanan masyarakat terhadap bencana yang lebih spesifik serta monitoring "sekolah" siaga bencana.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap tim penyelenggara, narasumber pelatihan, dan peserta. Penelitian dimulai April – Juni 2014. Penelitian ini berisi tentang proses pendidikan transformatif dalam pengelolaan mitigasi bencana untuk pengurangan risiko bencana, studi kasus pada pelatihan evakuasi mandiri bagi masyarakat terhadap bahaya bencana letusan gunung berapi di Yogyakarta (G.Merapi), Probolinggo (G.Bromo), dan Blitar (G.Kelud). Penelitian ini menggunakan paradigma Post-Positivisme. Nasution (1988) mengatakan postpositivisme mencoba memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan holistic, memandang peristiwa secara keseluruhan dalam konteksnya dan mencoba memperoleh pemahaman yang holistik. Selain itu, post positivisme juga memahami makna suatu permasalahan, dan memandang hasil penelitian sebagai kegiatan bersifat spekulatif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan varian penelitian studi kasus. Lexy Moleong (2000) menyatakan, metodologi kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar secara holistic. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan subjektif (interpretif). Peneliti bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana, dan sebagainya. Penelitian deskriptif menjelaskan atau menerangkan peristiwa. Suharsimi Arkunto. (2006). mentakan pendekatan subyektif mengasumsikan bahwa pengetahuan tidak mempunyai sifat yang obyektif dan sifat yang tetap, melainkan bersifat interpretif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan studi literatur, dalam pembahasan penelitian ini akan mendeskripsikan tentang proses implementasi pendidikan transformative dalam pengelolaan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana yang berisi lima ranah: Pertama, pendidikan dan pelatihan untuk pengambilan keputusan ancaman bencana; Kedua, pelatihan kajian risiko bencana; Ketiga, pelatihan pemahaman gejala bencana alam;

Keempat, *workshop* budaya sadar bencana dan Kelima, pemantauan ketahanan masyarakat terhadap bencana yang lebih spesifik serta monitoring "sekolah" siaga bencana.

### 3.1. Pendidikan dan pelatihan untuk pengambilan keputusan ancaman bencana

Masyarakat di daerah lereng Merapi Sleman, lereng Bromo Probolinggo dan lereng Kelud Blitar belum pernah memperoleh pendidikan dan pelatihan pengambilan keputusan apabila dihadapkan dengan ancaman bencana. Hanya sebagian kecil masyarakat di lereng G. Merapi pernah mengikuti pelatihan pengambilan keputusan bencana yang diadakan oleh salah satu LSM di Yogyakarta bekerja sama dengan Pusat Kajian Kebencanaan UGM dan Pemerintah Provinsi DIY. Dalam pelatihan itu, sebagian kecil masyarakat dihadapkan dengan situasi simulative bencana gunung meletus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan apabila dihadapkan dengan ancaman bencana gunung meletus pada umumnya didasarkan pada "intuitif" dan informasi yang diberikan oleh BMKG. Sebagian kecil masyarakat di lereng G. Merapi Sleman ini aktif mendengarkan radio komunitas yang memantau kegiatan gunung Merapi apabila ada tanda-tanda mau meletus. Mereka selanjutnya mengadakan rapat-rapat kilat dan darurat (istilah menurut mereka) untuk mengambil keputusan mengungsi atau menunggu "tanda-tanda" mistik akan meletusnya gunung Merapi. Sementara pada masyarakat di sekitar Gunung Bromo dan Gunung Kelud, keputusan untuk mengungsi atau tidak dalam mengurangi resiko bencana sangat tergantung dari informasi pemerintah.

### 3.2. Pelatihan Kajian Risiko Bencana

Pemahaman masyarakat sekitar ketiga gunung tersebut terhadap risiko bencana diperoleh dari pengalaman sebelumnya dan pelatihan yang diadakan oleh berbagai pihak. Di ketiga daerah penelitian, pada umumnya masyarakat sudah memperoleh pelatihan kajian risiko bencana, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Pelatihan dilakukan dalam bentuk sarasehan dengan jumlah peserta terbatas. Peserta yang telah dilatih ini kemudian memberikan pelatihan pada masyarakat sekitar. Umumnya masyarakat sadar benar akan risiko bencana yang dihadapi, tetapi pengakuan yang muncul adalah "ketidakterdayaan", bahwa di sekitar lereng gunung itulah satu-satunya tempat penghidupan dan kehidupan. Sehingga untuk menghadapi risiko bencana, sebagian masyarakat melakukan tindakan preventif. Untuk menyelamatkan ternak apabila terjadi bencana gunung meletus, masyarakat di lereng Gunung Merapi misalnya, membentuk "kandang ternak bersama" atau "kandang ternak komunitas". Gunanya untuk mengurangi risiko pencurian ternak apabila terjadi bencana. Hal seperti ini belum dilakukan masyarakat di lereng Gunung Bromo atau Kelud. Untuk mengurangi risiko korban jiwa, masyarakat umumnya patuh pada perintah yang berwenang. Kepatuhan di ketiga daerah sedikit berbeda karena pengalaman kolektif yang berbeda pula. Bagi masyarakat sekitar Bromo, kepatuhan belum optimal karena masih banyaknya masyarakat yang melanggar larangan-larangan yang dibuat pemerintah. Pengalaman meletusnya G Merapi yang membawa korban Mbah Marijan beberapa waktu lalu, masyarakat lereng Merapi kini jauh lebih patuh pada pemerintah daripada sebelumnya.

### 3.3. Pelatihan pemahaman gejala bencana alam.

Pada umumnya masyarakat di ketiga daerah tersebut telah memperoleh pelatihan mengenai gejala bencana alam. Bagi masyarakat yang hidup di daerah bencana, sebenarnya masyarakat telah paham benar gejala-gejala akan terjadinya bencana, khususnya gunung meletus. Pemahaman ini tercipta karena kebiasaan-kebiasaan selama hidup berdampingan dengan gunung merapi. Namun hal itu dipandang belum cukup karena kebiasaan-kebiasaan gunung meletus dengan tanda-tanda alamnya mulai berubah. Dalam pelatihan pemahaman gejala bencana, masyarakat menginventarisasi gejala-gejala yang "biasa" mereka pahami sebelum gunung meletus. Pemahaman ini bersifat "intuitif", seringkali tidak rasional. Namun demikian, pemahaman masyarakat akan gejala bencana gunung meletus yang didasarkan pada "pengalaman intuitif" ini tidak lagi dapat dijadikan acuan. Untuk lebih memberikan pemahaman gejala bencana kepada masyarakat sekitar gunung berapi, baik Pemerintah Sleman, Probolinggo maupun Blitar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah memberikan pelatihan beberapa kali tentang pemahaman gejala bencana. Dengan slogan "Kenali gejala bencana, antisipasi, dan Selamatkan diri" masyarakat diajak lebih dini dapat mengurangi risiko bencana. Dalam pengelolaan mitigasi bencana ini masyarakat mengembangkan ide-ide dan praktik-praktik pengurangan bencana atas dasar pemahaman intuitif dan pemahaman rasional teknologis.

### 3.4. Workshop Budaya Sadar Bencana

Di ketiga daerah penelitian, pelaksanaan *workshop* budaya sadar bencana dilakukan beberapa kali oleh BPBD. Namun penyuluhan tentang budaya sadar bencana sudah banyak dilakukan. Masyarakat sebenarnya telah menyadari benar-benar akan risiko bencana yang terjadi, namun karena mereka tidak berdaya, hampir sebagian besar masyarakat mengabaikannya. Hal ini berkaitan dengan prinsip dan keyakinan hidup masyarakat, bahwa bencana adalah "takdir" yang harus diterima. Faktor ini pula yang seringkali menjadi penghambat bagi pengelolaan mitigasi bencana untuk mengurangi dampak risiko bencana. Namun demikian, sebagian masyarakat di Merapi mempunyai pandangan yang berbeda, bahwa kesadaran akan bencana yang dimiliki itu disebarkan melalui radio komunitas. Setiap saat radio komunitas ini mengingatkan pentingnya budaya sadar bencana. Internalisasi budaya

sadar bencana inilah yang merupakan salah satu faktor menurunnya dampak risiko bencana, terutama yang berkaitan dengan korban jiwa, dapat dikurangi ketika Gunung Merapi meletus beberapa waktu lalu yang memakan korban jiwa sebanyak 16 orang. Jika budaya sadar bencana ini tidak disosialisasikan secara intensif melalui radio komunitas, mungkin korban bencana dapat menjadi lebih besar.

### 3.5. Pemantauan ketahanan masyarakat terhadap bencana yang lebih spesifik serta monitoring "sekolah" siaga bencana.

Masyarakat di daerah penelitian ini rata-rata tidak melakukan kegiatan pemantauan dan monitoring secara berkelanjutan terhadap bencana. Masyarakat menilai bahwa pemantauan dan monitoring bencana menjadi tugas pemerintah. Kecuali di lereng Merapi di mana masyarakat memantau lewat radio komunitas, masyarakat di dua daerah lain mengaku belum pernah diberi pelatihan pemantauan dan monitoring bencana. Apabila masyarakat melakukan pemantauan hanya dilakukan saat diberi informasi mengenai gejala bencana gunung meletus oleh aparat setempat. Pemahaman tentang pemantauan bencana pun masih sangat kurang memadai. Masyarakat menganggap bahwa memantau bencana gunung meletus tidak terlalu penting karena tidak setiap saat gunung berapi itu meletus. Masyarakat lebih fokus pada pekerjaan sehari-hari bertani untuk bertahan hidup di lereng-lereng gunung berapi.

## 4. KESIMPULAN

Pengelolaan mitigasi bencana dengan melibatkan masyarakat sebenarnya merupakan kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu melalui implementasi pendidikan transformatif perlu dilakukan pengelolaan mitigasi bencana berbasis masyarakat. Namun dari penelitian yang dilakukan, sebelum pengelolaan mitigasi bencana berbasis masyarakat dengan menerapkan model pendidikan transformatif ini dilakukan, perlu beberapa langkah yang harus disepakati dan dilakukan bersama. Pertama, masyarakat di sekitar bencana harus dapat diorganisasi dengan baik. Kedua, membangun saling kepercayaan dan tanggungjawab bersama untuk membangun pengelolaan mitigasi bencana. Ketiga, perlu dibuat secara bersama perencanaan tindakan dan pemecahan agar pertama-tama dan terutama masyarakat mampu mengurangi dampak risiko bencana. *Last but not least*, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mendorong pengelolaan mitigasi bencana berbasis masyarakat.

## 5. REFERENSI

- Arimastuti, A, 2011, *Tahapan Proses Komunikasi Fasilitator Dalam Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana*, Journal Penanggulangan Bencana, Vol 2, No.2
- Dan, Hentra and McBean, Gordon, 2010, *Canadian Disaster Management Policy: Moving toward a Paradigm Shift?*, Journal of Canadian Public Policy, Vol. 31, No. 3
- Dietz and Rogers, 2014, *Transformative Education? A Philosophic-Augustinian Response*, Journal of Science and Business, Vol.40, No.4
- Howes, Michael, 2013, *Public Policy Wicked Problems in Disaster Management*, Journal of Public Policy Network, Vol.X, No.3,
- Howes and Smith, 2013, *Public Policy, Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation*, Journal of Public Policy Network Vol.X, No.3,
- Moleong, Lexy J, 1997, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.
- Pant and Pande, 2012, *International Strategy For Disaster Reduction (ISDR): Living with Risk: A global view of disaster risk reduction initiatives*. Journal of Management Disaster, Volume 21, No.3.